

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
INTISARI	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Batasan Masalah.....	5
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Studi Terdahulu	7
2.1.1 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peran Para Pihak dalam Proyek Konstruksi	7
2.1.2 Korupsi dalam Proyek Konstruksi	10
2.1.3 Putusan Tindak Pidana Korupsi Proyek Konstruksi	12
2.2 Kebaruan Penelitian	14
BAB 3 LANDASAN TEORI.....	15
3.1 Proyek Konstruksi	15
3.2 Stakeholder Proyek Konstruksi	15
3.3 Kontrak Konstruksi	17
3.3.1 Standar Nasional	17
3.3.2 Standar Internasional	18
3.3.2.1 FIDIC (<i>Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils</i>)	18
3.3.2.2 AIA (<i>American Institute of Architects</i>)	21

3.4	Tindak Pidana Korupsi.....	22
BAB 4 METODE PENELITIAN		28
4.1	Jenis Penelitian.....	28
4.2	Sumber Data.....	28
4.3	Prosedur Penelitian.....	29
4.3.1	Studi Literatur	29
4.3.2	Pengumpulan Data Sekunder.....	29
4.4	Metode Analisis Data	30
BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN.....		32
5.1	Hasil Penelitian	32
5.1.1	Gambaran Umum Putusan yang Dianalisis	32
5.1.2	Identifikasi permasalahan pada perkara peningkatan jalan poros (LAPEN) Kawasan X – Kabupaten X	36
5.1.3	Evaluasi terhadap Putusan Majelis Hakim dalam Perkara Peningkatan Jalan Poros	41
5.1.4	Identifikasi permasalahan pada perkara pembangunan tangki septik kabupaten X	43
5.1.5	Evaluasi terhadap Pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara Tangki Septik	49
5.1.6	Identifikasi Permasalahan pada Perkara pada Peningkatan Jalan X.....	51
5.1.7	Evaluasi terhadap Pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara Peningkatan Jalan X... ..	60
5.1.8	Identifikasi Permasalahan pada Perkara pada Penambahan Ruang Operasi dan Intensive Care Unit (ICU) RSUD.....	63
5.1.9	Evaluasi terhadap Pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara RSUD	70
5.1.10	Identifikasi Permasalahan pada Perkara Penambahan Ruang Operasi dan Intensive Care Unit (ICU) RSUD	73
5.1.11	Evaluasi terhadap Pertimbangan Majelis Hakim pada Perkara Penambahan Ruang Operasi dan ICU RSUD.....	81
5.2	Pembahasan.....	84
5.2.1	Pembahasan terhadap Perkara dengan Terdakwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	85
5.2.2	Pembahasan terhadap Perkara dengan Terdakwa Penyedia Jasa.....	87
5.2.3	Pembahasan terhadap Perkara dengan Terdakwa Konsultan Pengawas.....	89
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN.....		91
6.1.	Kesimpulan.....	91
6.2.	Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....		93

DAFTAR TABEL

Tabel 5. 1. Daftar Putusan	32
Tabel 5. 2. Ringkasan Permasalahan Proyek dan Permasalahan Terdakwa	34
Tabel 5. 3. Temuan Teknis & Ketidaksesuaian Volume Perkara Jalan	58
Tabel 5. 4. Temuan Teknis & Ketidaksesuaian Volume Pekerjaan RSUD	67
Tabel 5. 5. Temuan Teknis & Ketidaksesuaian Volume Pekerjaan Perkara RSUD	78